

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi dan modernisasi saat ini, tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) memegang peranan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi organisasi, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Penerapan prinsip-prinsip GCG tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kinerja organisasi, tetapi juga untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya publik. Perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi para pemangku kepentingan dan memperkuat daya saingnya. (Governance, 2006)

Komponen utama GCG adalah sistem pengendalian internal yang efektif, yang memastikan bahwa kegiatan perusahaan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam sistem ini, lingkungan pengendalian berfungsi sebagai elemen fundamental yang mencakup integritas, nilai-nilai etika, struktur organisasi, serta kebijakan dan prosedur perusahaan dalam mencapai tujuan strategis. Lingkungan pengendalian yang diterapkan dengan baik dapat memitigasi risiko kecurangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. (Commission, 2013)

Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan daerah sangat penting untuk mendorong pengelolaan yang profesional dan mengedepankan pelayanan publik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja, dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum mewajibkan Perumda untuk menyusun rencana bisnis yang terstruktur dengan baik, rencana kerja yang sistematis, dan anggaran yang jelas dan terukur. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan Perumda dalam menyediakan layanan air sehat kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel, serta meminimalkan risiko salah kelola keuangan dan operasional.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memberikan kerangka kerja yang terstruktur bagi badan usaha milik daerah untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional. Sebagai badan usaha milik pemerintah daerah, Perumda Air Minum (PUDAM) Kabupaten Banyuwangi bertanggung jawab untuk membangun lingkungan pengendalian yang selaras dengan prinsip-prinsip SPIP. Hal ini mencakup pembinaan integritas, penegakan nilai-nilai etika, dan penguatan peran manajemen dalam mendorong budaya pengendalian yang kuat. Penerapan pengendalian internal yang tepat sesuai dengan pedoman SPIP sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, memitigasi risiko kecurangan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

Berdasarkan penelitian dari Ilyas dkk. (2021). *“The Role Of Control Environment In Developing Internal Control Effectiveness And Good Corporate Goverment.”* Menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal di Kantor Distrik Kampar Kiri Hulu belum diterapkan secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip SPIP. Tantangan utama meliputi pemahaman karyawan yang terbatas tentang pelaporan keuangan, ketidakteraturan dalam dokumentasi aset, dan ketidakakuratan dalam laporan keuangan. Selain itu, pengawasan yang tidak memadai dan koordinasi yang buruk semakin menghambat efektivitas sistem. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan peningkatan kompetensi staf, penyempurnaan penerapan komponen pengendalian internal, dan penguatan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan aset dan pelaporan keuangan.

Berdasarkan penelitian dari Arif dkk. (2024). *“Exploring Control Environment Practices In Local Government-Owned Companies.”* Menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian dalam badan usaha milik pemerintah masih relatif kurang berkembang. Meskipun koordinasi

antardepartemen berkontribusi pada kesadaran yang lebih besar terhadap pengendalian, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam bidang-bidang seperti manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan. Penelitian ini juga menekankan perlunya proses yang terstruktur dengan baik dalam memilih auditor, bersama dengan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap budaya organisasi dan dinamika politik untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan sistem pengendalian internal.

Perumda Air Minum (PUDAM) Kabupaten di Banyuwangi, sebagai badan usaha milik pemerintah, memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan air sehat kepada masyarakat. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor pelayanan publik, Perumda Air Minum (PUDAM) harus mengelola sumber dayanya secara efektif untuk memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi kepada para pelanggannya. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan dituntut untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat yang menjamin efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menganalisis praktik lingkungan pengendalian di Perumda Air Minum (PUDAM) Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini mereplikasi penelitian berjudul *"Exploring Control Environment Practices In Local Government-Owned Companies."* karena relevansinya dalam menganalisis bagaimana lingkungan pengendalian diterapkan di perusahaan milik daerah, khususnya dalam memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dengan berfokus pada Perumda Air Minum (PUDAM) Kabupaten Banyuwangi, penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi apakah praktik lingkungan pengendalian perusahaan selaras dengan prinsip dan peraturan yang ditetapkan, seperti Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Analisis Praktik Lingkungan Pengendalian Pada Perusahaan Milik Pemerintah Daerah: Studi Perumda Air Minum (PUDAM) Kabupaten Banyuwangi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti menyajikan permasalahan yang perlu diteliti yaitu, Bagaimana praktik lingkungan pengendalian yang diterapkan di Perumda Air Minum (PUDAM) Kabupaten Banyuwangi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik lingkungan pengendalian yang diterapkan di Perumda Air Minum (PUDAM) Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan diantaranya :

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini membantu peneliti meningkatkan pemahaman tentang lingkungan pengendalian sebagai komponen penting dari sistem pengendalian internal di perusahaan milik daerah.

2. Bagi Instansi

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi referensi yang berharga bagi Perumda Air Minum (PUDAM) dalam menilai dan meningkatkan efektivitas praktik lingkungan pengendaliannya.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini berfungsi sebagai landasan untuk penelitian selanjutnya yang bertujuan untuk mengeksplorasi sistem pengendalian internal secara lebih komprehensif, khususnya mengenai lingkungan pengendalian di perusahaan milik pemerintah.